

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah proses dalam penggunaan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan ilmu akuntansi untuk melakukan pilihan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebagai bekal menghadapi keadaan di masa depan (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Seng dan Su, 2010). Teori akuntansi positif memberikan beberapa penjelasan dan model prediksi yang dapat membantu memprediksi perilaku investor, analis keuangan, pemberi pinjaman, auditor, manajer dan pembuat standar mengenai prosedur akuntansi yang mendasari laporan keuangan. Investor dan analis tidak boleh menafsirkan neraca dan angka laba sebagai perkiraan yang tidak bias karena insentif pribadi manajer dapat memengaruhi mereka, seringkali sebagai fungsi skema kompensasi mereka (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Christensen dkk, 2012). Teori akuntansi positif didasarkan bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator berusaha untuk meningkatkan utilitas mereka untuk menuju kemakmuran mereka. Pemilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh mereka didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat dari prosedur akuntansi untuk meningkatkan utilitas mereka.

Sebagai contoh, dihipotesiskan bahwa manajemen mempertimbangkan pengaruh angka akuntansi yang dilaporkan terhadap regulasi pajak, biaya politis, kompensasi manajemen, informasi biaya produksi dan retriksi yang ditemukan dalam perjanjian pinjaman (Belkaoui, 2012).

Oleh karena itu, manajer cenderung berperilaku oportunistik ketika memilih metode akuntansi, risiko bahwa manajemen akan bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan pribadi mereka melalui insentif seperti rencana bonus dan kontrak utang. Insentif ini menyebabkan tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif (Watts dan Zimmerman, 1978 dalam Manihuruk dan Farahmita, 2015): (1) Hipotesis kompensasi manajemen (*Management compensation hypothesis*) - manajer dengan rencana bonus lebih cenderung menerapkan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan bonus saat ini. (2) Hipotesis utang (*Debt hypothesis*) - manajer dengan *debt to equity* yang lebih tinggi lebih mungkin meningkatkan pendapatan untuk menghindari pelanggaran perjanjian melalui pemeliharaan modal kerja, rasio pembayaran dividen, dan pembatasan utang tambahan. (3) Hipotesis biaya politik (*Political cost hypothesis*) - perusahaan besar cenderung menerapkan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi keuntungan untuk tujuan kewajiban; ini digambarkan dalam literatur sebagai biaya politik.

2. Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan pola hubungan antara *principal* dan agen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih *principal* terlibat dengan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang mendelegasikan beberapa kewenangan membuat keputusan kepada agen. Ada 2 macam bentuk hubungan keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). *Principal* bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk mengelola modal pemilik. Agen adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola modal dari *principal*, mengambil keputusan dan tidak menanggung risiko.

Teori agensi terkait dengan kesejahteraan finansial para *principal* (pemegang saham) yang mungkin tidak dimaksimalkan karena perbedaan dalam asimetri informasi, risiko, dan preferensi tujuan. Teori agensi menyediakan kerangka kerja untuk memeriksa hubungan antara sistem informasi yang digunakan, insentif dan perilaku. Sistem evaluasi kinerja untuk mengukur laporan keuangan (dilaksanakan oleh auditor sebagai pihak ketiga) sering dipilih oleh pemegang saham untuk mengukur peran agen atas nama *principal* yang menjalankan organisasi. Dalam keadaan seperti itu, konflik kepentingan dapat timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kerja yang disepakati. Auditor

dipekerjakan dan ditunjuk oleh pemegang saham untuk bekerja secara mandiri di bawah standar audit dan untuk menjembatani kepentingan manajer dan pemegang saham. Contoh tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer termasuk penyalahgunaan fasilitas perusahaan, dan tindakan disfungsional dalam menggunakan biaya; yang terakhir dapat termasuk di bawah anggaran yang dibelanjakan seperti untuk biaya pemasaran dan ahli teknis, yang kemudian dapat berdampak negatif terhadap tujuan jangka panjang perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986 dan Belkoui 2004). Kondisi ini menyebabkan ketimpangan informasi (informasi asimetri) dan dapat menyebabkan masalah moral hazard seperti pengejaran (oleh manajemen) dari kegiatan yang tidak dalam kepentingan utama *principal*.

3. Aset Tetap

Suwardjono (2013) didalam bukunya menyebutkan bahwa suatu objek dapat dikatakan sebagai aset memiliki beberapa karakteristik utama, dan karakteristik utama aset harus dipenuhi oleh objek tersebut, yaitu:

- a) *Objek tersebut harus memiliki manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti.*
- b) *Objek tersebut dikuasai atau dapat dikendalikan oleh perusahaan dan tidak harus dimiliki oleh perusahaan.*

c) Objek tersebut timbul akibat transaksi yang dilakukan pada masa lalu.

Terdapat dua macam aset yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. PSAK No 1 (Revisi 2009) menyebutkan bahwa *“aset lancar dan aset tidak lancar perusahaan disajikan secara terpisah, dan aset lancar disajikan berdasarkan ukuran likuiditasnya.”*

Menurut PSAK 16 (Revisi 2011) menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang: *“dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”* Manfaat ekonomi masa depan ditentukan dalam hal potensi aset berkontribusi secara langsung atau tidak langsung ke kas dalam perusahaan atau menjadi produktif dalam aktivitas operasi. Klasifikasi dari aset berwujud, sebagai berikut: tanah dan bangunan, instalasi dan mesin teknis, instalasi lain, peralatan dan perabotan, uang muka kepada pemasok aset tetap yang tetap dan aktiva tetap dalam proses produksi.

PSAK 16 (Revisi 2011) menyebutkan *“biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika memiliki kemungkinan yang besar bahwa perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan pengukuran secara andal dapat dilakukan terhadap biaya perolehan aset tersebut.”* Berdasarkan penyusutannya maka aset tetap dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:

- a) *Depreciable assets*, yaitu aset tetap yang dapat dilakukan penyusutan. Contohnya bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan.
- b) *Nondepreciable assets*, yaitu aset tetap yang tidak dapat dilakukan penyusutan. Contohnya tanah.

Suwardjono (2017) didalam bukunya menyebutkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai aset, suatu objek tidak harus dimiliki oleh perusahaan cukup dikuasai objek tersebut oleh perusahaan. Kepemilikan mempunyai makna yaitu kepemilikan yang ilegal atau yuridis, artinya, untuk dapat memiliki suatu objek harua ada transfer hak milik atau penyerahan hak milik. Jadi konsep menguasai (kendali) lebih penting dari pada konsep pemilikan. “*Prinsip pengakuan aset tetap terhadap semua biaya perolehanan yang terjadi harus dapat dievaluasi oleh entitas, termasuk biaya perolehan awal atau biaya untuk mengkonstruksi aset tetap serta biaya yang dibutuhkan untuk menambah, mengganti, maupun memperbaiki*” (PSAK No 16 Revisi 2011).

Aset yang telah diakui, nilai wajar dari aset tetap yang dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, pada tanggal revaluasi nilai wajar dikurangi dengan akumulasi penyusutan dn akumulasi rugi penurunan setelah tanggal revaluasi yang terjadi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan untuk jumlah yang tercatat dipastikan tidak mengalami perbedaan secara material dari jumlah yang telah

ditentukan dengan penggunaan nilai wajar pada akhir pelaporan (PSAK 16 Revisi 2011).

Dalam setiap periode, tidak harus dilakukan revaluasi. Tetapi apabila terdapat perubahan nilai wajar dari aset yang direvaluasi maka perlu dilakukan revaluasi. Apabila terdapat perbedaan yang material dari nilai wajar pada aset yang direvaluasi dengan jumlah tercatatnya maka perlu dilakukan revaluasi lanjutan. Apabila setelah dilakukan revaluasi jumlah aset tercatat mengalami peningkatan, maka peningkatan tersebut langsung dikreditkan pada bagian surplus revaluasi di ekuitas dan pada laporan laba rugi harus diakui pada jumlah penurunan nilai aset revaluasinya yang sebelumnya sudah diakui.

Menurut Matei, Tole, dan Stroe (2017) terdapat beberapa kategori revaluasi aset tetap berwujud sebagai berikut:

- a) Pengembangan lahan dan lahan, bangunan, instalasi teknis, sarana transportasi, hewan, dan perkebunan, furnitur, peralatan kantor, peralatan untuk melindungi nilai manusia dan material dan aset tetap berwujud lainnya;
- b) Aset tetap berwujud dalam konsesi, yang disewa, atau digunakan secara gratis untuk orang-orang;
- c) Aset hukum, tanpa tujuan patrimonial, serta aset yang ditemukan dalam administrasi biaya administrasi otonom;
- d) Kapasitas ditugaskan sebagian, dari jenis aset tetap nyata yang belum terdaftar seperti itu;

- e) Aset tetap berwujud yang telah mengalami perubahan investasi (modernisasi, perbaikan, rehabilitasi, dan konsolidasi) yang telah meningkatkan nilai 'buku akuntansi' mereka, terlepas dari sumber pendanaan investasi;
- f) Aset tetap berwujud yang diperoleh oleh institusi publik di bawah kontrak sewa pembiayaan;
- g) Aset tetap nyata pada representasi diplomatik, komersial, militer di luar negeri, dalam konflik

Revaluasi merupakan prosedur penetapan nilai wajar, yang merupakan nilai kini dari aset tetap berwujud. Nilai wajar ditetapkan sebagai hasil dari penerapan metode akuntansi alternatif untuk menentukan nilai dari aset tetap berwujud pada tanggal neraca. Sebagai pendekatan alternatif, lembaga publik dapat memilih keluar dari penerapannya untuk aset tetap nyata yang dapat direvaluasi. Nilai yang dihasilkan dari revaluasi akan dikaitkan dengan aset sebagai ganti biaya perolehan atau biaya produksi, bergantung pada situasinya. Oleh karena itu, dalam neraca, aset tetap nyata yang telah direvaluasi akan menampilkan nilai revaluasi mereka.

4. *Leverage*

Brown dkk (1992) dalam Manihuruk dan Farahmita (2015) berpendapat bahwa baik pelanggaran teknis perjanjian utang berbasis akuntansi, atau tingkat *leverage* yang tinggi pada neraca, akan

menghasilkan pembayaran utang yang mahal atau peningkatan biaya renegotiasi ke perusahaan. Beneish dan Press (1995) dalam Seng dan Su (2010) menyatakan tiga konsekuensi utama dari standar teknis setelah proses renegotiasi: perjanjian tambahan, peningkatan suku bunga, dan pengurangan pinjaman yang diperbolehkan. Whittred dan Chan 1992 dan Smith (1993) dalam Christensen dkk (2012) menyatakan bahwa keberadaan batas utang yang ketat akan membatasi peluang investasi perusahaan, karena proyek yang sangat menguntungkan mungkin dilewatkan karena pembatasan dalam kapasitas pinjaman perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan cenderung memilih metode akuntansi yang membantu perusahaan untuk mengurangi biaya kontrak ini yang terkait dengan perjanjian hutang dan perputaran perusahaan (Whittred dan Zimmer, 1986 dalam Barac dan Šodan, 2010).

Karena revaluasi atas aset tetap dapat meningkatkan nilai buku dari total aset dan cadangan revaluasi aset, rasio utang terhadap aset atau utang terhadap ekuitas perusahaan akan ditingkatkan. Posisi neraca yang kuat, pemberi pinjaman akan bersedia melonggarkan pembatasan utang atau mengurangi biaya bunga. Oleh karena itu, berpendapat bahwa perusahaan lebih mungkin untuk melakukan revaluasi aset ketika tingkat leverage tinggi di neraca mereka (Lin dan Peasnell, 2000).

5. *Fixed Asset Intensity*

Fixed Asset Intensity (FAI) merepresentasikan proporsi aset tetap dibandingkan total aset perusahaan (Lin dan Peasnell, 2000). *Fixed Asset Intensity* di penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Peasnell (2000) dihitung sebagai aset jangka panjang dibagi dengan total aset. Di satu sisi, aset tetap mewakili agunan perusahaan, sehingga rasio rendah dari aset tetap menjadi total dapat memotivasi manajer untuk mengungkapkan nilai pasar aset tetap dan meningkatkan kapasitas pinjaman (Rahman, 2017). Dalam hal ini, relasinya diharapkan menjadi negatif. Di sisi lain, semakin banyak perusahaan memiliki aset tetap, yaitu semakin tinggi nilai rasio *fixed asset intensity*, semakin besar efek revaluasi. Dalam hal ini mempunyai hubungan yang positif (Barlev, 2007).

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Penentuan besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aset (Atikasari dan Handayani, 2017). Perusahaan dengan ukuran besar memiliki total aset yang besar, lebih leluasa dalam mempergunakan aset untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Perusahaan berukuran kecil lebih terbatas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena kepemilikan aset lebih sedikit. Indikator

pengukuran bagi variabel ukuran perusahaan yang lainnya adalah penjualan. Jika penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jumlah penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan akan menderita kerugian. Semakin besar total penjualan maka akan semakin banyak perputaran uang dan semakin mudah kapitalisasi pasar, semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat (Hilmi dan Ali, 2008). Perusahaan besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan karena lebih mudah memasuki pasar, memperoleh tingkat pendapatan yang tinggi sehingga berpengaruh pada profitabilitas yang nantinya dapat menambah kemakmuran pemilik.

7. Umur Perusahaan

Nofandrilla (2008) menyatakan bahwa umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Dengan demikian, umur perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan suatu perusahaan. Perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak dan mengetahui kebutuhan konstituennya atas informasi tentang perusahaan. Umur perusahaan pada tanggal revaluasi dari tanggal operasi komersial dapat menjadi faktor di balik revaluasi. Diasumsikan bahwa perusahaan tua yang mengikuti prinsip akuntansi biaya akan menghasilkan pertumbuhan

yang tinggi dalam jumlah revaluasi dan sebaliknya. Oleh karena itu, usia perusahaan mungkin memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan jumlah revaluasi (Rahman, 2017).

8. Beban Pajak Tangguhan

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) pengertian pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan antara laba akuntansi lebih kecil (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 2003:115). Perbedaan antar laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. Efek perubahan perbedaan temporer yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (deferred tax expense) atau penghasilan pajak tangguhan (deferred tax income), dan

dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini (current tax expenses), dengan penyajian secara terpisah (Yulianti, 2005).

Dalam PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Sedangkan pengertian pajak penghasilan yang lebih jelasnya ada pada UU No 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia, baik dipakai untuk menambah kekayaan atau konsumsi wajib pajak dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Dalam PSAK 46 (2010) mengatur tentang pajak penghasilan yang juga mengatur tentang pajak tangguhan. Pajak yang dibayarkan perusahaan diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku namun dalam mekanismenya diatur juga oleh peraturan perpajakan Direktorat Jendral Pajak (Ramadhan, 2015). Karena adanya kedua pihak yang mengatur tentang pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan maka ada pengakuan yang berbeda dimana menurut standar akuntansi diperbolehkan tetapi menurut perpajakan tidak diperbolehkan, oleh karena itu istilah perbedaan temporer muncul sebagai liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan yang ada dalam laporan keuangan.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Kecenderungan Perusahaan Memilih Revaluasi Aset Tetap.

Teori akuntansi positif, menjelaskan bahwa manajer dihadapkan pada pilihan metode-metode akuntansi untuk memaksimalkan nilai mereka. Dalam konteks aset tetap, manajer dihadapkan pada situasi oportunistik untuk memilih apakah menggunakan model revaluasi atau model biaya untuk mengukur aset tetap setelah pengakuan awalnya. Keputusan untuk melakukan revaluasi aset tetap didasarkan pada sejumlah situasi dan motivasi tertentu agar bisa memaksimalkan nilai mereka. Salah satu situasi keuangan perusahaan yang cukup mendapat perhatian adalah *leverage*. *Leverage* menggambarkan proporsi utang terhadap aset ataupun ekuitas.

Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran kreditur pada kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya. Sejalan dengan teori akuntansi positif, berusaha menjelaskan keputusan manajer melakukan revaluasi terkait dengan motivasinya menurunkan *leverage*. Revaluasi akan memperbesar nilai aset dan bisa memperkuat beberapa rasio keuangan, khususnya *debt to asset ratio* maupun *debt to equity ratio*. Rasio *leverage* turun sehingga menurunkan risiko perusahaan di mata kreditur karena posisi aset menjadi lebih kuat (Jaggi dan Tsui, 2001). Sebaliknya perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah cenderung

tidak melakukan revaluasi aset tetap karena posisi keuangan perusahaan sudah cukup baik.

Nurjanah (2013) dan Yulistia dkk (2015) meneliti perusahaan di Indonesia tidak berhasil memberikan bukti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Namun bukti empiris berhasil ditunjukkan oleh Lin dan Peasnell (2000); Piera (2007); Barac dan Šodan (2011) serta Manihuruk dan Farahmita (2015) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap revaluasi aset tetap, yaitu apabila tingkat *leverage* suatu perusahaan tinggi, maka akan semakin mendorong perusahaan dalam menerapkan metode revaluasi untuk asetnya.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Leverage* berpengaruh positif terhadap kecenderungan perusahaan memilih revaluasi aset tetap.

2. Pengaruh *Fixed Asset Intensity* Terhadap Kecenderungan Perusahaan Memilih Revaluasi Aset Tetap.

Revaluasi aset tetap dapat menyebabkan nilai perusahaan meningkat dan oleh sebab itu potensi yang dimilikinya besar terhadap peningkatan basis aset dengan meningkatkan kapasitas pinjaman perusahaan sehingga pemilihan model revaluasi sesuai untuk diterapkan (Tay, 2009). Semakin tinggi proporsi aset tetap perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan manajer untuk melakukan revaluasi.

Modal operasi jangka panjang perusahaan ditunjukkan melalui aset tetapnya, sehingga *fixed asset intensity* yang tinggi akan berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh perubahan penilaian aset tetapnya. *Fixed asset intensity* (intensitas aset tetap) dapat menggambarkan kemungkinan kas yang diperoleh apabila aset tetap tersebut dijual.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2013); Manihuruk dan Farahmita (2015); Latifa dan Haridhi (2016) berhasil memberikan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *fixed asset intensity* (intensitas aset tetap) terhadap pemilihan metode revaluasi aset tetap perusahaan. Namun ada beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Barac dan Šodan (2011) dan Purnamasari (2017) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh *fixed asset intensity* terhadap revaluasi aset.

Berdasarkan penelitian-penelitian dan uraian penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Fixed Asset Intensity* berpengaruh positif terhadap pemilihan revaluasi aset tetap.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kecenderungan Perusahaan Memilih Revaluasi Aset Tetap.

Ukuran perusahaan merupakan elemen dari political cost dan sering dikaitkan dengan hal politik. Manajemen perusahaan seringkali

melaporkan laba yang telah dikurangi kepada publik guna untuk menarik perhatian regulator (pemerintah) yang hubungannya dengan pembayaran pajak yang tinggi dan hal lainnya (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Barac dan Šodan, 2011).

Insentif yang lebih tinggi yang dimiliki perusahaan besar dibanding dengan perusahaan kecil menjadi salah satu faktor ukuran perusahaan dapat memengaruhi keputusan memilih untuk melakukan revaluasi aset (Lin dan Peasnell, 2000). Khairati (2015) di Indonesia dan Tay (2009) yang meneliti perusahaan di Selandia Baru menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kinerja dan penjualan yang tinggi, artinya revaluasi aset tetap dilakukan oleh perusahaan yang besar untuk menghindari sorotan dari pihak regulator sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Sherlita dkk (2008) menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan metode revaluasi aset tetap. Purnamasari (2017) dan Yulistia dkk (2015) tidak menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap revaluasi aset tetap.

Berdasarkan penelitian dan uraian penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan perusahaan memilih revaluasi aset tetap.

4. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Kecenderungan Perusahaan Memilih Revaluasi Aset Tetap.

Umur perusahaan pada tanggal revaluasi dari tanggal operasi komersial dapat menjadi faktor di balik revaluasi. Perusahaan yang sudah lama berdiri, kemungkinan sudah banyak pengalaman yang diperoleh. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Dan hal ini akan menimbulkan kepercayaan konsumen serta investor terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan yang telah lama berdiri dimungkinkan memiliki reputasi yang lebih dari perusahaan yang baru saja berdiri, karena seiringnya dengan perjalanan waktu yang lebih lama perusahaan telah menghadapi berbagai kondisi tersebut menunjukkan adanya stabilitas dalam manajemen perusahaan. Diasumsikan bahwa perusahaan tua yang mengikuti prinsip akuntansi biaya akan menghasilkan pertumbuhan yang tinggi dalam jumlah revaluasi dan sebaliknya. Oleh karena itu, usia perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan jumlah revaluasi (Rahman 2017).

Rahman (2017) meneliti perusahaan tekstil di Bangladesh membuktikan bahwa umur perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Berdasarkan uraian dan penelitian di atas peneliti ini ingin menguji kembali hubungan umur perusahaan dengan keputusan revaluasi aset tetap hipotesis yang dirumuskan di halaman selanjutnya:

H₄: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan perusahaan memilih revaluasi aset tetap.

5. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Kecenderungan Perusahaan Memilih Revaluasi Aset Tetap.

Pajak adalah beban perusahaan menurut undang-undang yang harus dibebankan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (Nadeak, 2011). Dalam hal membayar pajak biasanya perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Meminimalisasi beban pajak perusahaan tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Revaluasi aset tetap diharapkan meningkatkan nilai aset tetap, dengan naiknya nilai aset tetap maka biaya yang dikeluarkan juga semakin tinggi maka hal itu dapat mengurangi laba perusahaan. Bahwa laba merupakan komponen utama perhitungan pajak perusahaan dikenakan (Chrisdianto dan Yunus 2011). Pelaporan beban pajak penghasilan yang mencakup pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deffered tax), menghasilkan laba akuntansi yang lebih informatif dan dapat mencerminkan kinerja perusahaan sebenarnya. Investor menyadari bahwa penghasilan atau beban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi merupakan hasil dari

perbedaan penyusutan laba akuntansi dan laba fiskal. Dengan kesadaran tersebut, investor akan memahami bahwa kenaikan atau penurunan laba akuntansi akibat dari revaluasi karena penilaian aset dengan nilai wajar yang mengakibatkan meningkatnya beban depresiasi. Dengan perusahaan melakukan revaluasi laba fiskal akan lebih rendah dari laba komersial yang dapat mengurangi beban pajak tangguhan, sehingga dapat mengurangi beban pajak.

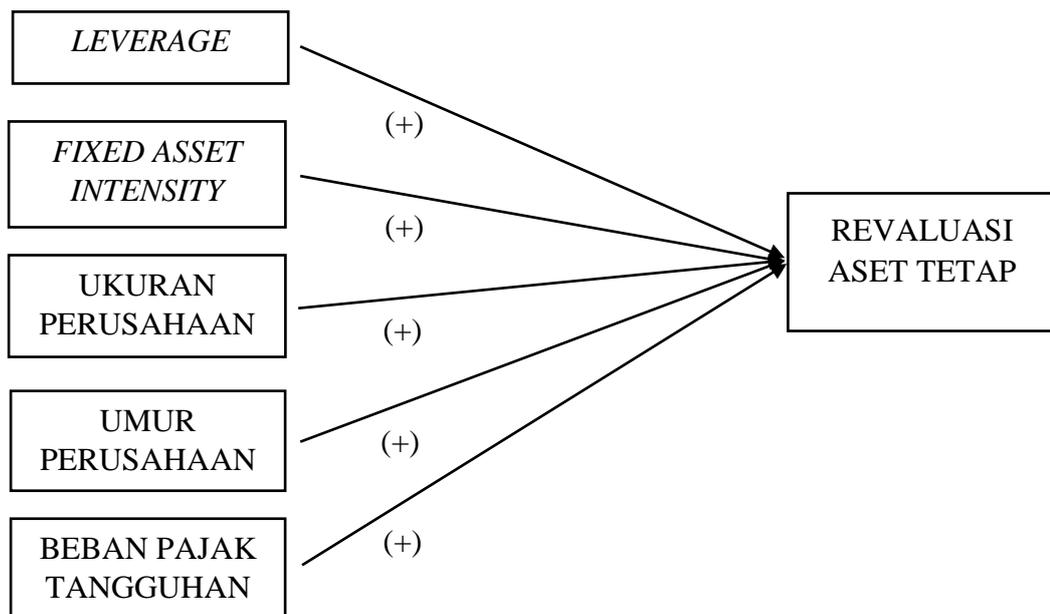
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadeak (2011) menemukan bahwa penghematan pajak berpengaruh positif terhadap metode revaluasi aset. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2015) tidak menemukan bukti empiris bahwa penghematan pajak berpengaruh positif terhadap metode revaluasi aset tetap.

Berdasarkan penelitian dan uraian penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap kecenderungan perusahaan memilih revaluasi aset tetap.

D. Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tinjauan penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian